

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah merupakan instansi vertikal tingkat regional di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di wilayah tersebut untuk menjalankan kebijakan pemasyarakatan serta memastikan bahwa seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayahnya beroperasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Wilayah kerjanya mencakup 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah dan membawahi 67 unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang terdiri dari 32 Lembaga Pemasyarakatan, 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 18 Rumah Tahanan Negara, 8 Balai Pemasyarakatan, dan 8 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Tetapi setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambahkan jumlah kementerian di kabinetnya, sehingga yang awalnya berjumlah 34 kementerian bertambah sesuai kebutuhan menjadi 46 kementerian.

Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, hal ini tertuang pada Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang semula berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sekarang berganti di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden RI No.157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

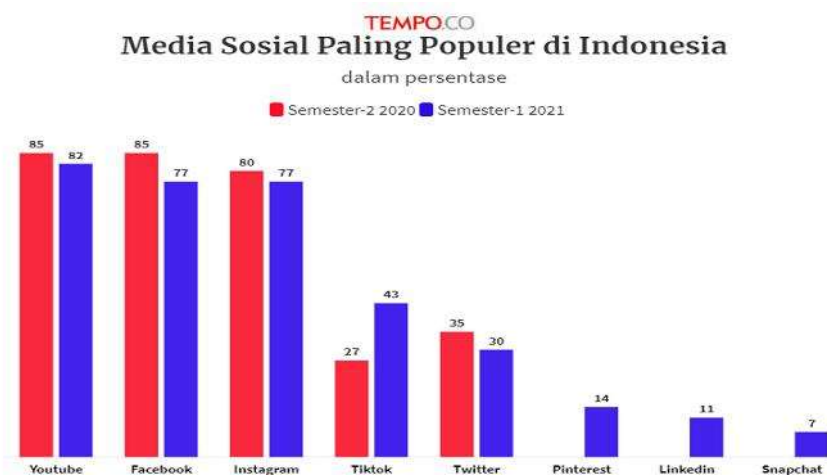
Perubahan ini berlaku juga pada Kantor Wilayah di Provinsi salah satunya yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar Sodik selaku Ketua TI dan Komunikasi Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Pada 13 Februari 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), bukan lagi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada akhir Februari 2025 Kantor sudah berpindah di Kantor Rupbasan Kelas 1 Semarang. Dalam pengelolaan informasi publik, seluruh akun media sosial resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah juga dimulai dari awal. Oleh karena itu dilakukan upaya intensif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena kurangnya informasi yang berkaitan seputar pemasyarakatan.

Informasi kini dapat disebarluaskan melalui berbagai bentuk yang beragam, di mana teknologi informasi berperan besar dalam mengubah cara kerja media komunikasi, terutama dalam mempercepat proses penyebaran informasi. Media komunikasi merupakan sarana yang berfungsi untuk mempermudah proses pertukaran informasi dalam berkomunikasi. Media komunikasi memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi di lembaga atau instansi pemerintahan (Sari & Fitriawan, 2020). Salah satu media komunikasi yang saat ini sering digunakan yaitu media komunikasi digital seperti: *website*, email, dan media sosial (Instagram, Youtube, dll).

Media sosial menjadi salah satu media yang banyak dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, karena dampaknya

yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam berkomunikasi (Zuniananta, 2021). Pengelolaan media sosial sebagai media informasi publik merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 yang merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 memberikan paduan bagi instansi pemerintah dalam memanfaatkan media sosial.

Berdasarkan laporan *platform* survei Jakpat, Youtube merupakan media sosial yang paling populer di Indonesia selama periode enam bulan pertama 2021. Sebanyak 82 % responden mengaku mengakses Youtube, diikuti oleh Facebook dan Instagram yang sama-sama diakses oleh 77% responden.



Gambar 1.1 Hasil Survei Jakpat Mengenai Media Sosial Paling Populer di Indonesia

Youtube adalah salah satu media yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dalam bentuk video yang dapat diakses secara online (Zain & Ridwan, 2023). Berbagai macam konten video bisa diakses dalam Youtube, mulai dari musik, olahraga, *live style*, *gaming*, masakan, dan vlog. Inilah yang membuat Youtube digunakan oleh pengguna setiap harinya, bahkan mereka dapat berjam-jam dalam melihat siaran Youtube.

Sedangkan Instagram saat ini dapat dianggap sebagai salah satu *platform* media sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, termasuk dalam hal pencarian informasi. Instagram secara umum

berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik serta menjalin interaksi antar pengguna (Putri, 2021).

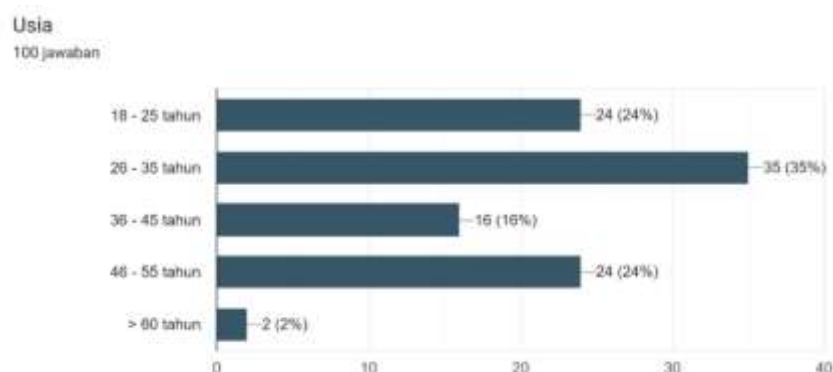
Dalam hal ini humas memiliki tanggung jawab dalam informasi publik agar tersampaikan secara efektif dan membangun citra positif. Hubungan Masyarakat (humas) adalah peran yang sangat penting dalam suatu lembaga atau institusi untuk membentuk opini publik yang positif agar dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat baik dari internal atau eksternal (Crisbiantoro, 2024).

Berdasarkan hasil dari wawancara sebelumnya, Kantor Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah masih dalam tahap penyesuaian karena adanya perubahan yang terjadi, dan perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam menyebarkan informasi kepada publik. Dengan adanya hal tersebut, penulis melakukan survei terhadap 100 responden yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Hasil Survei persebaran Kota/Kabupaten dari 100 responden, menunjukkan yang berasal dari Banyumas sebanyak 3 orang (3%), Boyolali 3 orang (3%), Brebes 4 orang (4%), Cilacap 12 orang (12%), Demak 7 orang (7%), Grobogan 1 orang (1%), Jepara 3 orang (3%), Kebumen 3 orang (3%), Klaten 3 orang (3%), Kudus 4 Orang (4%), Magelang 3 Orang (3%), Pati 1 orang (1%), Pekalongan 1 Orang (1%), Rembang 2 Orang (2%), Salatiga 3 Orang (3%), Semarang 32 Orang (32%), Surakarta 4 Orang (4%), Tegal 5 Orang (5%), Temanggung 1 Orang (1%), Wonosobo 5 Orang (5%).



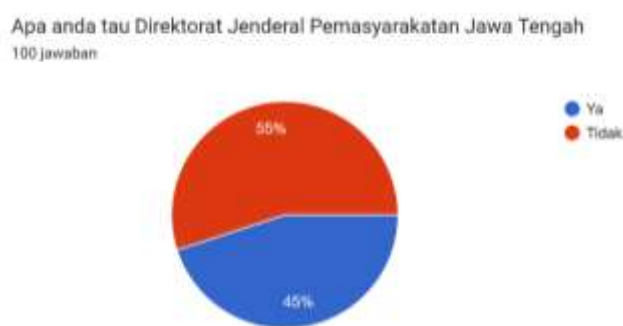
Gambar 1.2 Hasil Survei Kota/Kabupaten Responden

Berdasarkan hasil survei 100 responden menunjukkan usia 18 – 25 tahun sebanyak 24 Orang (24%), 26 – 35 Tahun 35 Orang (35%), 36 – 45 Tahun 16 Orang (16%), 46 – 55 Tahun 24 Orang (24%), dan > 60 Tahun 2 Orang (2%).



Gambar 1.3 Hasil Survei Usia Responden

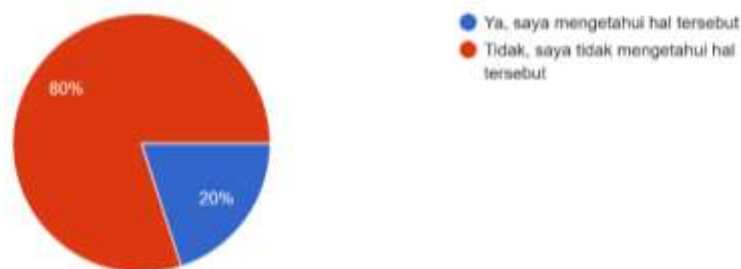
Dari hasil survei juga menunjukkan bahkan masih ada yang belum tau atau mengenal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya data sekuder melalui survei terhadap 100 responden yang berada di Provinsi Jawa Tengah mengenai apakah masyarakat mengetahui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah. Hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa 55% masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui, dan 45% mengetahui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah.



Gambar 1.4 Hasil Survei Apakah Anda Tau Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah

Dan juga masyarakat belum mengetahui mengenai perubahan Kementerian yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Hal ini diperkuat oleh jawaban 100 responden mengenai apakah masyarakat mengetahui bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang awalnya di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), saat ini telah berubah di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipras RI). Hasil survei menunjukkan bahwa 80% masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, dan 20% lainnya mengetahui bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah sekarang berada di bawah naungan Kemenimipras RI. Dapat disimpulkan bahwa perlunya informasi yang lebih detail dan jelas mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Apakah Anda mengetahui bahwa Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah yang awalnya berada di bawah naungan Kemenkumham saat ini telah berubah di bawah naungan Kemenimipras RI?  
100 jawaban



Gambar 1.5 Hasil Survei Responden Apakah Tau Bahwa Kanwil Ditjenpas Mengalami Perubahan Kementerian

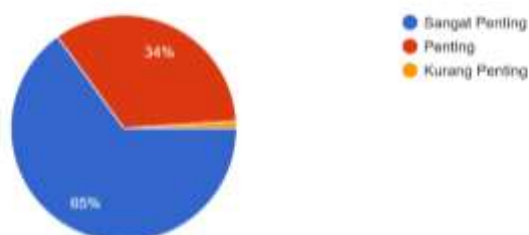
Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah kepada masyarakat adalah melalui *video company profile*. Karena dengan *company profile* dapat menyajikan data secara ringkas, jelas, dan menarik sehingga mudah dipahami masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai alat pengenalan identitas tetapi juga sarana strategis dalam mendukung penyebaran informasi kepada khalayak luas.

*Company profile* merupakan media informasi yang penting saat ini dan diharapkan menjadi solusi, sarana penyampaian informasi, serta alat promosi yang dibutuhkan. Selain itu, *company profile* juga menjadi aset berharga bagi suatu lembaga atau institusi dalam meningkatkan citra atau reputasinya (Prihandini & Seba , 2021).

Hal ini dapat diperkuat dengan pengambilan data oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Fajar Sodik Selaku Ketua Tim TI dan Informasi Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 2025, menyatakan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah saat ini belum memiliki video *company profile* setelah perubahan yang ada, jadi video *company profile* saat ini diperlukan.

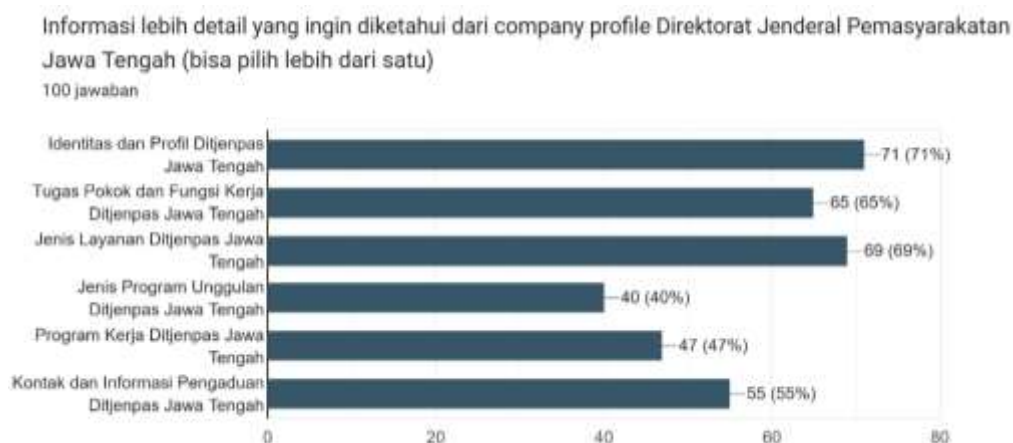
Dan dapat dibuktikan juga dengan adanya data sekunder melalui survei 100 responden mengenai pentingnya Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah dalam membuat *company profile* sebagai penyelesaian masalah. Pada survei tersebut menunjukkan bahwa 65% masyarakat menganggap bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah sangat penting dengan adanya pembuatan *company profile*, 34% masyarakat menganggap penting dengan adanya *company profile*, dan 1% masyarakat menganggap *company profile* kurang penting. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyatakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah sangat perlu dengan adanya pembuatan *company profile* ini.

Seberapa penting menurut anda dengan adanya company profile bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah?  
100 jawaban



Gambar 1.6 Hasil Survei Seberapa Penting Adanya *Company Profile*

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transparansi dan modernisasi layanan publik, pembuatan *video company profile* dalam instansi pemerintah merupakan elemen yang penting untuk membangun citra baik di mata publik dan memperkenalkan profil, visi, misi, serta berbagai layanan, dan program unggulan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Dengan harapan dapat menjadi media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, mitra kerja, serta instansi terkait. Berdasarkan hasil kuesioner 100 responden, masyarakat ingin mengetahui informasi terkait Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan menunjukkan adanya ketertarikan dari masyarakat terhadap instansinya. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan mengenai detail informasi apa saja yang paling diminati oleh responden yaitu identitas dan profil Ditjenpas Jawa Tengah dengan persentase 71%, selanjutnya Jenis Layanan Ditjenpas Jawa Tengah dengan persentase 69%, kemudian Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Ditjenpas Jawa Tengah dengan persentase 65%, lalu Kontak dan Informasi Pengaduan Ditjenpas Jawa Tengah dengan persentase 55%, Program Kerja Ditjenpas dengan persentase 47%, dan Jenis Program Unggulan Ditjenpas Jawa Tengah dengan persentase 40%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui informasi tentang Identitas dan Profile Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah.



Gambar 1.7 Hasil Survei Informasi Yang Ingin Diketahui Dari *Company Profile*

Dengan demikian, judul tugas akhir yang dipilih penulis adalah **“Produksi Video *Company Profile* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Sebagai Media Informasi Publik”**. Judul ini dipilih karena *video company profile* dapat menjadi sarana strategis untuk menyampaikan informasi sekaligus memperkenalkan instansi kepada masyarakat luas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui perubahan struktur kelembagaan yang semula di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sekarang menjadi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras), tugas dan fungsi (tupoksi), jenis layanan, program unggulan, dan program kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan perlu adanya media informasi yang lebih jelas agar dapat mengetahui tentang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah setelah perubahan struktur kelembagaan pada tahun 2024.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan project tugas akhir ini adalah memberikan informasi kepada publik mengenai identitas, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), jenis layanan, jenis program unggulan, dan program kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang pada tahun 2024 telah berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras), melalui *video company profile*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- Memberikan referensi bagi penelitian sejenis terkait produksi *video company profile* institusi pemerintah.

- Mengembangkan wawasan dalam bidang produksi media digital dan strategi komunikasi visual.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat yang diperoleh bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah secara praktis adalah dapat memberikan informasi dan identitas institusi kepada publik.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat**

Manfaat yang diperoleh bagi masyarakat adalah dapat membantu masyarakat dalam memahami identitas, tugas pokok dan fungsi kerja, jenis layanan, program unggulan, program kerja, dan kontak informasi pengaduan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Yang dapat di akses melalui media sosial sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapanpun mereka butuhkan.

### **1.5 Luaran**

Adapun produk yang dihasilkan dari *Project* Tugas Akhir ini adalah produksi media *public relations* berupa video *company profile* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, video Di Balik Jeruji, Tumbuh Harapan, dan video Alur Kunjungan WBP di Lapas yang nantinya akan di publikasi melalui media sosial Youtube dan Instagram Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah.